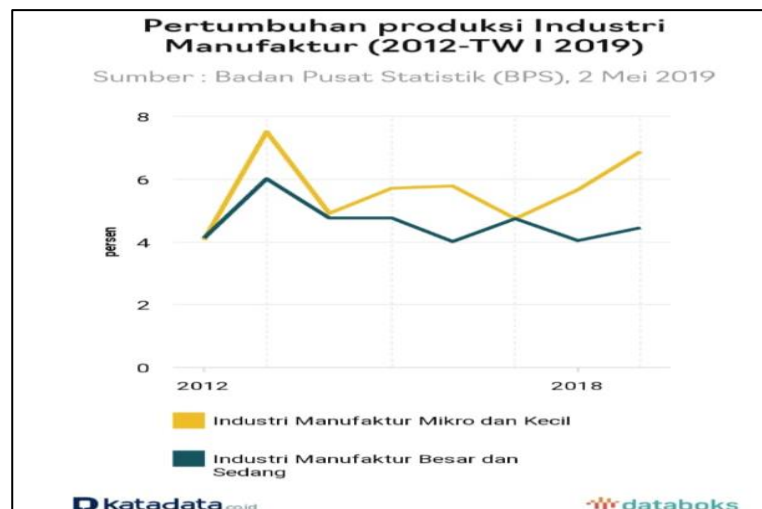


I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menjadi basis industri manufaktur terbesar se-ASEAN yang memberikan kontribusi besar pada perekonomian skala nasional, perkembangan industri manufaktur di Indonesia saat ini menunjukkan kinerja yang semakin baik dengan adanya ekspansi dan peningkatan tenaga kerja menurut menteri perindustrian Airlangga Hartanto (Sulistyo, 2018). Selain itu, menurut ASEAN *Briefing* “Indonesia’s Manufacturing Sector menyebutkan bahwa “Indonesia’s manufacturing sector has historically played a key role in the country’s economic development and now contributes to 20 percent of GDP. The government has ambitious plans to propel the country into the top ten biggest economies in the world by 2030, with manufacturing at the heart of this goal. The main areas of production include textiles and garments, food and beverages (F&B), electronics, automotive, and chemicals, with the majority of manufacturers in this sector comprising of micro, small, or medium-sized enterprises” (Falak, 2020). Bidang industri manufaktur menjadi sektor potensial yang memberikan andil terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dibanding sektor lainnya. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan pertumbuhan industri manufaktur seperti pada gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Grafik pertumbuhan produksi industri manufaktur
Data yang diolah oleh BPS kemudian disajikan kembali oleh Kusnandar
(2019) dalam Databoks, terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perkembangan Industri Manufaktur dari Tahun ke Tahun

Tahun	Industri manufaktur mikro dan kecil	Industri manufaktur besar dan sedang
2012	4,06%	4,12%
2013	7,51%	6,01%
2014	4,91%	4,76%
2015	5,71%	4,76%
2016	5,78%	4,01%
2017	4,74%	4,74%
2018	5,66%	4,04%
2019	6,88%	4,45%

Sumber : <https://databoks.katadata.co.id> (Diakses 4 Oktober 2020)

Tabel 1 menunjukkan produksi industri manufaktur tetap tumbuh, meskipun melambat dibanding capaian tertingginya pada 2013, walaupun perkembangan industri manufaktur melambat, PDB dari sektor manufaktur tetap memiliki andil bagi penerimaan negara. Industri manufaktur merupakan industri yang paling diminati oleh para investor diantara berbagai industri lainnya, dikarenakan perkembangan industri manufaktur cukup tinggi berbeda dengan industri – industri lainnya, industri manufaktur memiliki rata-rata pengembalian (*return*) yang tinggi dan merupakan salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional dengan menyumbang ekspor tertinggi tercatat di tahun 2019 data dari Kementerian Perindustrian industri manufaktur memberikan kontribusi terbesar hingga tembus 126,57 miliar dollar AS atau 75,5% dari capaian nilai ekspor nasional.

Perusahaan industri manufaktur merupakan jenis atau badan usaha yang bergerak di bidang industri pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai tambah melalui satu atau lebih proses sehingga memiliki nilai jual. Industri manufaktur memiliki sifat dan karakter yang berbeda dengan industri lain, salah satunya industri manufaktur memerlukan alokasi biaya investasi yang sangat besar, untuk jangka waktu yang relatif panjang dan penuh dengan ketidak pastian untuk itu pendanaan merupakan isu utama bagi

perusahaan manufaktur terkait dengan pengembangan perusahaan. Perusahaan dengan pertumbuhan perusahaan yang tinggi memerlukan kebutuhan dana yang besar pula, oleh karena itu perusahaan manufaktur terjun ke pasar modal untuk menyerap investasi dan untuk memperkuat posisi keuangan (Suastini dkk., 2016). Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI diklasifikasikan menjadi beberapa bidang yaitu industri dasar dan kimia, aneka industri dan aneka barang konsumsi.

Sub sektor industri dasar dan kimia mencakup usaha pengolahan bahan-bahan terkait kimia dasar yang akan digunakan pada proses produksi selanjutnya dan industri farmasi. Sub sektor aneka industri atau *Miscellaneous industry* meliputi usaha pembuatan mesin-mesin berat maupun ringan termasuk komponen penunjangnya. Sub sektor dari perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi adalah sektor industri yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman, rokok, farmasi, kosmetik, dan barang keperluan rumah tangga, serta peralatan rumah tangga. Perusahaan-perusahaan yang bergerak pada sektor industri barang konsumsi mempunyai aktivitas operasi yang tinggi sehingga menyebabkan perusahaan harus mampu mengelola setiap aktivitasnya agar dapat memperoleh keuntungan dan mampu memaksimalkan kinerjanya. Selain itu, penguatan kinerja industri manufaktur sektor industri barang konsumsi juga terlihat dalam laporan keuangan, terutama komponen laba.

Laba pada industri manufaktur merupakan hal penting yang menjadi fokus pemakai laporan keuangan baik pihak internal maupun eksternal, karena nilai laba diharapkan layak untuk menggambarkan kinerja perusahaan dalam periode secara keseluruhan, laba juga merupakan hasil pertanggungjawaban manajemen perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa laba yang dilaporkan perusahaan adalah hasil yang dilakukan pihak akuntansi dan dengan campur tangan manajemen dalam mengubah angka laba dengan meminimalkan atau memaksimalkan laba, dengan kata lain manajemen melakukan praktek manajemen laba (*earning management*).

Santana, dan Wira Kusuma (2016) menyatakan bahwa manajemen laba adalah proses yang dilakukan manajemen secara sengaja, dengan standar akuntansi keuangan sebagai batasan dalam mengarahkan pelaporan laba yang diinginkan. Manajemen laba yaitu suatu proses untuk mengintervensi laba yang dilaporkan

dalam laporan keuangan, dengan tujuan agar manajer dapat menarik investor untuk tetap menanamkan modalnya. Selain itu, manajemen laba juga sebagai cara manajemen untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dengan berupaya meningkatkan keuntungannya. Manajemen laba berhubungan dengan tingkat perolehan laba atau capaian usaha suatu perusahaan, karena tingkat laba yang didapatkan biasanya berkaitan dengan capaian manajemen yang nantinya menentukan besar kecilnya bonus yang diterima manajer. Manajemen laba juga memiliki tujuan yaitu untuk memaksimalkan laba dan menghindari kerugian. Pola yang dilakukan untuk memaksimalkan laba yaitu dengan teknik *income smoothing*, teknik ini dilakukan dengan cara melaporkan pertumbuhan laba yang stabil dan tidak secara drastis.

Banyak hal yang dilakukan manajer dalam mempraktikkan manajemen laba, salah satunya yaitu melalui perencanaan pajak. Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan upaya untuk meminimalkan beban pajak yang sejalan dengan pihak manajemen untuk menekan dan membuat beban pajak yang dibayarkan dapat sekecil mungkin, maka pihak manajemen melakukan upaya untuk meminimalkan pembayaran pajak.

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan tindakan yang legal dan diperbolehkan oleh pemerintah selama masih dalam lingkup hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pohan (2016) memberikan pengertian, perencanaan pajak yaitu suatu cara yang dilakukan perusahaan dalam hal pengurangan beban pajak agar pajak yang dibayarkan lebih kecil. Maka dari itu, perencanaan pajak dianggap hal lumrah karena dapat menghemat perusahaan dalam membayar beban pajaknya, namun dalam praktiknya perencanaan pajak dapat memberikan kerugian bagi negara karena mengurangi pemasukan dari sektor pajak. Jadi, dapat dikatakan bahwa perencanaan pajak merupakan tindakan legal yang sewaktu-waktu dapat merugikan pemerintah. Perencanaan pajak yang buruk akan mengakibatkan kekeliruan yang timbul dan mengakibatkan penyimpangan pajak dengan cara penggelapan pajak. Perencanaan pajak dan manajemen laba yang merupakan tindakan beresiko dapat dicegah dengan adanya tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance* (GCG).

Tata kelola perusahaan adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan yang baik berdasarkan prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan. Selain itu, tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang lemah memiliki lebih banyak celah untuk dilakukannya penyimpangan, sedangkan tata kelola perusahaan yang baik mampu menjadi batas bagi kepentingan pribadi agar tidak sewenang-wenang dalam mengambil keuntungan. Surya dan Yustivandana (2008) menerangkan bahwa tata kelola perusahaan memiliki empat faktor didalamnya, yaitu: Komite Audit, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial.

Penulisan skripsi mengenai Perencanaan Pajak dan Tata Kelola Perusahaan yang berkaitan dengan Manajemen Pajak telah banyak dilakukan. Penulisan yang dilakukan oleh Santana dan Wirakusuma (2016), Negara dan Saputra (2017), mendapatkan hasil positif dari pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba, karena semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar peluang perusahaan melakukan praktek manajemen laba. Berubahnya tarif PPh badan dapat mempengaruhi perilaku perusahaan dalam mengelola keuangannya dengan memperkecil jumlah laba kena pajak, sehingga perusahaan dapat menekan jumlah pajak yang dibayarkan. Sementara itu, Aditama dan Purwaningsih (2014), Mulyani ,dkk (2018) dan Mulyati, dkk (2019), menyimpulkan bahwa perencanaan pajak ternyata berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Tata kelola perusahaan juga dapat mempengaruhi manajemen laba. Penelitian mengenai tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba telah dilakukan oleh Larastomo, dkk (2016) dan Roodposhti *et al.*, (2011) menyebutkan bahwa tata kelola perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba dengan penambahan variabel dewan komisaris dan komisaris independen. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Geovani (2017), tata kelola perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sementara itu, Kusumawardhani (2012) tata kelola perusahaan, struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional) dan ukuran perusahaan secara simultan

berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba. Pada variabel lain dalam tata kelola perusahaan Taufik dan Kemala (2013) menyebutkan bahwa dewan direksi berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, sementara faktor lain dalam tata kelola perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Beberapa penulisan mengenai perencanaan pajak, tata kelola perusahaan dan manajemen laba yang pernah dilakukan menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Perbedaan hasil penulisan skripsi yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya inilah yang mendorong penulis untuk menguji kembali konsistensi hasil penulis terdahulu. Penulis ingin mengamati kembali pengaruh dari Perencanaan pajak dan tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba. Variabel yang ingin dikaji ulang oleh penulis terkait pengaruhnya terhadap manajemen laba diantaranya perencanaan pajak, dalam tata kelola perusahaan terdapat faktor-faktor yang akan menjadi variabel yaitu komite audit, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi sebelumnya yaitu terletak pada pengambilan sampel, penulis menggunakan perusahaan sektor barang konsumsi yang melakukan pembukuan secara tahunan dari tahun 2017-2019, dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), penulis menggunakan tahun 2017-2019 karena merupakan tahun terbaru untuk pengambilan sampel, dan tidak memasukkan tahun 2020-2021 dikarenakan pada tahun tersebut terjadi pandemi Covid-19 yang mengakibatkan kinerja perusahaan tidak maksimal dan mengalami penurunan sehingga laporan tahunan perusahaan tidak dapat disamakan dengan tahun sebelumnya dan alasan penulis menggunakan data perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi karena industri ini yang memproduksi berbagai jenis kebutuhan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Produk yang dihasilkan dari sektor industri ini merupakan kebutuhan sehari-hari manusia sehingga dianggap sebagai sektor yang tangguh dalam menghadapi krisis. Hal ini menjadi pembeda dengan skripsi sebelumnya karena menggunakan data laporan keuangan perusahaan terbaru dengan membandingkan perencanaan pajak dan tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba diharapkan dapat menjadi acuan pengambilan keputusan dari berbagai macam pihak. Untuk tata kelola perusahaan, penulis menggunakan empat faktor yaitu komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional dan

kepemilikan manajerial. Pada dasarnya, perencanaan pajak dapat memberi keuntungan bagi perusahaan dan kerugian besar bagi negara karena mengurangi pemasukkan negara dengan meminimalkan laba yang diperoleh. Manajemen laba yang berlebihan akan terkendali jika suatu perusahaan melaksanakan tata kelola perusahaan dengan baik. Perencanaan pajak dan manajemen laba yang merupakan tindakan beresiko yang dapat dicegah dengan adanya tata kelola perusahaan. Pada skripsi ini penulis memilih sektor industri barang konsumsi karena pada sub sektor ini memproduksi kebutuhan pokok yang paling dibutuhkan oleh masyarakat seiring dengan bertambahnya pertumbuhan penduduk di Indonesia. Maka berdasarkan uraian tersebut, penulis mengambil judul **“Pengaruh Perencanaan Pajak dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Manajemen Laba”**.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba?
3. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba?
5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba?
6. Apakah perencanaan pajak, komite audit, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba.
2. Mengetahui pengaruh komite audit terhadap manajemen laba.
3. Mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap manajemen laba.
4. Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba.
5. Mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba.

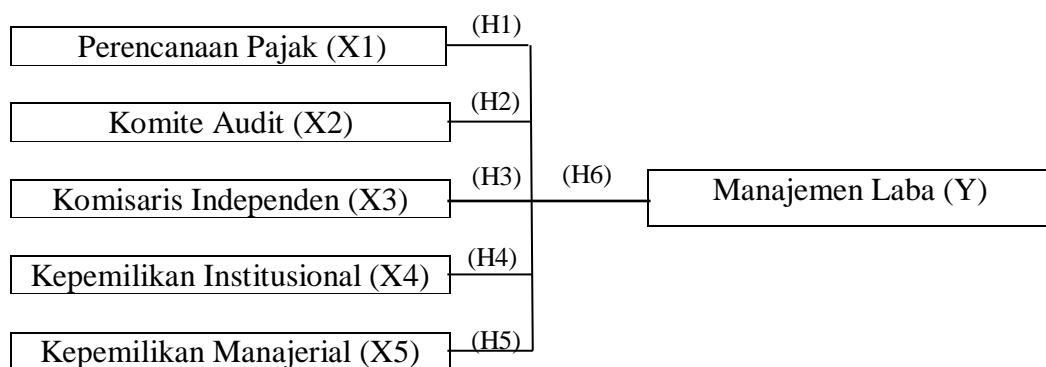
6. Mengetahui pengaruh perencanaan pajak, komite audit, dewan komisaris independent, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba.

1.4 Kontribusi

1. Segi Teoritis hasil skripsi ini berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan bidang akuntansi perpajakan yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam pembelajaran dan menjadi literatur dalam skripsi yang berkaitan dengan perencanaan pajak, tata kelola perusahaan dan manajemen laba.
2. Segi Praktis dalam aplikasinya hasil skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan. Hasil skripsi ini berkaitan erat dengan pengelolaan perusahaan yang baik untuk memaksimalkan laba yang dibutuhkan manajer dalam mengontrol kinerja organisasi. Skripsi ini juga referensi bagi pemerintah untuk penetapan ketentuan perpajakan demi mengurangi kerugian akibat perencanaan pajak yang dilakukan oleh entitas bisnis. Selain itu tata kelola perusahaan yang baik memberikan kontribusi yang positif bagi setiap komponen agar menjadi batas bagi kepentingan pribadi agar tidak menerobos kepentingan perusahaan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka kerangka pemikiran dalam skripsi ini adalah:



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teori

2.1.1 Teori keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi mengasumsikan bahwa setiap orang sepenuhnya dimotivasi oleh kesejahteraan dan kepentingan mereka sendiri. Supriyono (2018) menyatakan bahwa, konsep teori keagenan merupakan hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Dalam teori keagenan, yang dimaksud dengan prinsipal adalah pemegang saham atau pemilik yang menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan sementara itu, agen adalah manajemen yang memiliki kewajiban yang mengelola perusahaan sebagaimana yang telah diamanahkan prinsipal kepadanya. Dalam perencanaan pajak teori keagenan ini berhubungan, karena perbedaan kepentingan dimana dalam hal ini perbedaan kemauan perusahaan dengan pemerintah, yaitu perusahaan ingin menurunkan beban pajak seminim mungkin, sedangkan pemerintah menginginkan penerimaan dari pajak semaksimal mungkin. Pada tata kelola perusahaan terletak pada pihak manajemen dan institusional yang diarahkan untuk mengurangi perbedaan informasi antara pemilik dan manajer sehingga diharapkan dapat meminimalkan tindakan manajemen laba. Hal ini merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengawasi suatu perusahaan dan membatasi perilaku menyimpang manajemen adalah dengan tata kelola perusahaan.

2.1.2 Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah salah satu langkah awal yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha dan penghasilannya. Suandy (2008) mendefinisikan perencanaan pajak sebagai proses awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat menentukan penghematan pajak yang nantinya akan dilakukan. Menurut Ompusunggu (2011), perencanaan pajak yakni suatu rencana yang dilakukan wajib pajak untuk menyusun strategi keuangan agar mendapatkan beban pajak yang minimum. Tindakan perencanaan pajak ini tergolong legal, karena perencanaan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur. Rencana meminimalkan pajak dapat

ditempuh misalnya, mengambil ketentuan dari undang-undang perpajakan mengenai pengecualian dan pemotongan atau pengurangan yang diperkenankan. Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau kejadian mempunyai dampak perpajakan. Perencanaan pajak diukur dengan menggunakan rumus *tax retention rate*, yaitu menganalisis suatu ukuran dari efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan (Wild *et al.*, 2004). Ukuran efektifitas manajemen pajak yang dimaksud dalam skripsi ini yaitu ukuran efektifitas perencanaan pajak. Berikut adalah formula *tax retention rate* (Wild *et al.*, 2004):

$$\text{TRR} = \frac{\text{Net Income } it}{\text{Pretax Income}}$$

Keterangan:

TRR = *Tax Retention Rate*

Net Income it = Laba bersih perusahaan i pada tahun t

Pretax Income it = Laba sebelum pajak

2.1.3 Tata Kelola Perusahaan

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (2001) dalam Wibisana (2014) *Corporate Governance* adalah seperangkat aturan yang mengelola hubungan antara pengurus (pengelola) perusahaan, pemegang saham, karyawan, pemerintah, pihak kreditor, juga pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan kewajiban dan hak mereka. Dapat dikatakan bahwa *Corporate Governance* mengatur hubungan dan pertanggung jawab atau akuntabilitas perusahaan kepada anggota stakeholders non-pemegang saham. Sedangkan *Malaysian High Level Finance Commite on Good Corporate Governance* mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain. Walaupun terdapat beberapa definisi tentang tata kelola perusahaan, definisi tersebut memiliki kesamaan yang menghubungkan definisi yang satu dengan yang lainnya. Surya dan Yustivandana (2008) menerangkan bahwa *Good Corporate*

Governance memiliki empat faktor didalamnya, yaitu: Komite Audit, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial.

2.1.4 Komite Audit

Menurut Surya dan Yustivandana (2008), Komite audit adalah suatu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan pemeriksaan yang dianggap perlu serta melakukan tugas penting yang berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan. Anggota komite audit dapat berasal dari kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman dan kualitas lainnya yang dibutuhkan guna mencapai tujuan komite audit. Komite audit harus bebas dari pengaruh direksi, eksternal auditor dan hanya bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Komite audit yakni komite yang dibentuk oleh para dewan komisaris untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan dan memiliki peranan yang penting dalam hal melindungi kredibilitas penyusunan laporan keuangan, menerapkan *Good Corporate Governance* dan memastikan terjaganya sistem perusahaan yang baik. Pembentukan komite audit yang dilakukan oleh perseroan telah diatur oleh Bapepam-LK No.IX.15., Keputusan ketua Bapepam No Kep-29/PM/2004 tentang komite audit, selain itu pembentukan komite audit sesuai dengan keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No Kep-305/BEJ/07-2004. Dengan penerapan yang telah dilakukan oleh perusahaan dan berjalan sepenuhnya, maka pemantauan terhadap perusahaan lebih baik dan mengurangi perselisihan manajemen akibat keinginannya pemuasan dan keuntungan pribadi. Ukuran komite audit diprosikan dengan jumlah komite audit yang dimiliki perusahaan berdasarkan jumlah keseluruhan anggota komite audit baik yang berasal dari internal perusahaan maupun anggota komite audit independen. Jumlah komite audit dapat tercantum dalam laporan tahunan perusahaan (Sun, dkk., 2010). Adapun rumus untuk mencari proporsi komite audit:

$$\text{Komite Audit} = \frac{\text{Total anggota komite audit}}{\text{Total anggota dewan komisaris}}$$

2.1.5 Proporsi Dewan Komisaris Independen

Menurut Surya dan Yustivandana (2008), Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan. Selain itu, komisaris independen juga merupakan anggota dewan komisaris yang tidak berhubungan dengan direksi, pemegang saham pengendali dan anggota dewan komisaris lainnya serta terlepas dari ikatan bisnis atau ikatan lainnya yang dapat mempengaruhi kapabilitasnya untuk bertindak mandiri atau bertindak demi kepentingan perusahaan, disamping itu pengaruh berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berdampak dengan kepentingan pihak lain. Dewan komisaris independen sangat dibutuhkan dan menjadi penting karena banyak temuan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan saham publik (minoritas) serta *stakeholder* lainnya.

Tanggung jawab pokok yang dimiliki komisaris independen untuk mendorong diterapkannya prinsip GCG di dalam perusahaan yaitu melalui pemberdayaan dewan komisaris untuk dapat melakukan tugas pengawasan dan nasihat terhadap direksi secara efektif kepada direksi agar lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Selain itu, memastikan prinsip dan praktek GCG berupa menjamin keterbukaan laporan keuangan perusahaan, perlakuan adil terhadap pemegang saham minoritas dan *stakeholder* lain, pengungkapan transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil dan menjamin akuntabilitas perseroan. Independensi dewan komisaris independen diukur dengan persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan (independen) dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Adapun rumus untuk mencari proporsi komisaris independen:

$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah seluruh anggota komisaris}}$

2.1.6 Kepemilikan Institusional

Menurut Bernandhi (2013), kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya. Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Penguatan pengawasan yang lebih ideal dalam pengontrolan manajemen dapat didorong oleh kepemilikan institusional. Karena, semakin tinggi kepemilikan institusional pada perusahaan, maka semakin rendah kecenderungan manajer melakukan praktik manajemen laba. Investor institusional yang mempunyai kepemilikan saham besar akan mempunyai dorongan yang kuat untuk mendapatkan informasi, melakukan pengawasan terkait perilaku manajemen dan mengupayakan kinerja supaya membaik. Sedangkan investor noninstitusional memiliki kepemilikan saham yang cenderung kecil, maka para investor noninstitusional hanya memiliki dorongan yang lebih sedikit untuk melakukan pengawasan mengenai tindakan oportunistik. Kepemilikan institusional merupakan saham yang dimiliki oleh perusahaan yang berada dalam maupun di luar negeri serta saham pemerintah dalam maupun luar negeri. Guna dan Herawaty (2010) menyatakan bahwa, kepemilikan institusional diukur dengan skala rasio melalui jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusional dibandingkan dengan total saham perusahaan, dengan rumus:

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusional}}{\text{Total keseluruhan saham}}$$

2.1.7 Kepemilikan Manajerial

Menurut Bernandhi (2013), kepemilikan manajerial adalah tingkat kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang secara aktif terlibat di dalam pengambilan keputusan. Pengukurannya dilihat dari besarnya proporsi saham yang dimiliki manajemen pada akhir tahun yang disajikan dalam bentuk persentase. Kepemilikan manajerial dapat mensejajarkan antara kepentingan pemegang saham dengan manajer, karena manajer ikut merasakan langsung

manfaat dari keputusan yang diambil dan manajer yang menanggung risiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Menurut Efendi (2013), kepemilikan manajerial adalah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh direksi, manajer dan dewan komisaris. Pemisahan kepemilikan saham dan pengawasan perusahaan akan menimbulkan benturan kepentingan antara pemegang saham dan pihak manajemen. Benturan kepentingan antara pemegang saham dan pihak manajemen akan meningkat seiring dengan keinginan pihak manajemen untuk meningkatkan kemakmuran pada diri mereka sendiri. Persentase tertentu kepemilikan saham oleh manajer cenderung mempengaruhi manajemen laba.

Kepemilikan saham yang besar dari nilai ekonomisnya oleh manajer merupakan alat monitoring laba yang kurang berkualitas akibat dari praktik manajemen laba karena dalam menjalankan bisnis perusahaan. Pemisahan kepemilikan ini dapat menimbulkan konflik dalam pengendalian dan pelaksanaan pengelolaan perusahaan yang menyebabkan manajer bertindak tidak sesuai dengan pemilik. Dengan meningkatkan saham oleh manajer, diharapkan manajer dapat bertindak sesuai dengan keinginan pemilik karena manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja. Kepemilikan manajerial yang besar akan efektif untuk mengawasi aktivitas perusahaan (Susanti dan Titik, 2014). Kepemilikan manajerial di proyeksikan dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dibagi dengan total keseluruhan manajemen (Susanti dan Titik, 2014), dengan rumus berikut:

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Total keseluruhan saham}}$$

2.1.8 Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan pengungkapan manajemen sebagai alat intervensi langsung manajemen dalam proses pelaporan keuangan melalui pengolahan pendapatan atau keuntungan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat tertentu bagi manajer maupun perusahaan yang dilandasi oleh faktor ekonomi. Menurut Scott (2009) manajemen laba adalah tindakan manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi dari suatu standar tertentu

dengan tujuan memaksimalkan kesejahteraan dan atau nilai pasar perusahaan. Dari beberapa pernyataan para ahli, terlihat bahwa manajemen laba merupakan aktivitas manajerial untuk mempengaruhi laporan keuangan baik dengan cara memanipulasi data atau informasi keuangan perusahaan maupun dengan cara pemilihan metode akuntansi yang diterima dalam prinsip akuntansi, yang pada akhirnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan perusahaan. Berikut adalah formula untuk mendapatkan skala pengukuran perusahaan untuk melakukan manajemen dengan menggunakan *discretionary accruals*, dimana dalam pengukurannya menggunakan Modified Jones Model. Model pengukurannya adalah sebagai berikut:

$$TAC_t = N_t - CFO_t$$

Keterangan:

TAC_t = total akrual perusahaan pada periode t
 N_t = laba bersih perusahaan pada periode t
 CFO_t = aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan pada periode t

$$TAC_t / TA_{t-1} = \alpha_1 (1 / TA_{t-1}) + \alpha_2 (\Delta REV / TA_{t-1}) + \alpha_3 (PPE_t / TA_{t-1})$$

Keterangan:

TAC_t = total akrual perusahaan pada periode t
 TA_{t-1} = total aset perusahaan pada periode t-1
 α₁, α₂, α₃ = regresi
 ΔREV = REV_t - REV_{t-1}
 REV_t = pendapatan perusahaan pada periode t
 REV_{t-1} = pendapatan perusahaan pada periode t-1
 PPE_t = jumlah aktiva tetap

$$NDA_t = \alpha_1 (1 / TA_{t-1}) + \alpha_2 [(\Delta REV - \Delta REC) / TA_{t-1}] + \alpha_3 (PPE_t / TA_{t-1})$$

Keterangan:

NDA_t = non discretionary akrual perusahaan pada tahun t
 TA_{t-1} = total aset perusahaan pada periode t-1
 α₁, α₂, α₃ = regresi
 ΔREV = REV_t - REV_{t-1}
 REV_t = pendapatan perusahaan pada periode t
 REV_{t-1} = pendapatan perusahaan pada periode t-1

ΔREC	= $REC_t - REC_{t-1}$
REC_t	= piutang perusahaan pada periode t
REC_{t-1}	= piutang perusahaan pada periode t-1
PPE_t	= jumlah aktiva tetap

$$DA_t = (TAC_t / TA_{t-1}) - NDA_t$$

Keterangan:

NDA_t	= non discretionary akrual perusahaan pada tahun t
TAC_{t-1}	= total akrual perusahaan pada periode t
TA_{t-1}	= total aset perusahaan pada periode t-1

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan hipotesis permasalahan skripsi ini pernah dilakukan oleh:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Desain/Methodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1	Aditama dan Purwaningsih (2014)	Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Non Manufaktur yang Terdaftar di BEI.	Metode penentuan sampel : <i>purposive sampling</i> Uji Hipotesis : Statistik deskriptif, Uji Regresi.	Hasil yang diperoleh bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan non manufaktur yang terdaftar di BEI.
2	Giovani, (2017)	Pengaruh Struktur Kepemilikan, Tata Kelola Perusahaan, Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Manajemen Laba,	Metode penentuan sampel : <i>purposive sampling</i> Teknik Analisis: Regresi linear.	Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. Kepemilikan Institusional, Independensi Dewan Komisaris, dan Ukuran Komite Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Desain/Methodologi Penelitian	Hasil Penelitian
3	Sudiyanto (2016)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Dan Leverage Terhadap Manajemen Laba dan konsekuensinya Terhadap Nilai Perusahaan	Metode pengambilan sampel : <i>Purposive Sampling</i> Penelitian ini menggunakan dua metode analisis statistik deskriptif dan analisis Regresi	1. Kepemilikan institusional signifikan mempengaruhi manajemen laba 2. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba 3. Leverage tidak signifikan mempengaruhi manajemen laba. 4. Manajemen laba signifikan mempengaruhi nilai perusahaan
4	Ketut dan Gede (2010)	Pengaruh Perencanaan Pajak, Kepemilikan Manajerial Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Praktek Manajemen Laba,	Metode <i>nonprobability</i> sampling dengan teknik <i>purposive sampling</i> . Uji Hipotesis: uji koefisien determinasi, uji kelayakan model, uji hipotesis (uji t).	Perencanaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba. Kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktek manajemen laba.
5	Kusumawardhani (2012)	Pengaruh Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba	Metode penentuan sampel : <i>purposive sampling</i> Uji Hipotesis: Statistik deskriptif, Uji Regresi	Hasil yang diperoleh <i>Corporate Governance</i> , struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional) dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba.
6	Larastomo dkk., (2016)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Dan Penghindaran Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan	Metode penetapan sampel menggunakan <i>purposive sampling</i> Teknik analisis : analisis regresi linier berganda.	Secara parsial, dewan komisaris dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba Sebaliknya, variabel kepemilikan manajerial.

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Desain/Methodologi Penelitian	Hasil Penelitian
		Manufaktur Indonesia.	Di	dan <i>tax avoidance</i> berpengaruh positif terhadap <i>earning management</i> . Namun, komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
7	Mulyani dkk., (2018)	<i>The Effect of Tax Planning and Deferred Tax Expense on Earnings Management on Manufacturing Companies Listed In The Indonesia Stock Exchange</i>	Metode: <i>Purposive Sampling</i> Teknik Analisis: Statistik deskriptif (Uji Asumsi klasik dan Regresi linear berganda.	Berdasarkan hasil pengujian bahwa perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
8	Mulyati dan Apollo, (2019)	<i>The Impact Of Profitability, Tax Planning And Good Corporate Governance Toward Earnings Management (Study At Indonesia Stock Exchange Lq 45 Index Companies In 2014- 2016)</i>	Pengolahan data menggunakan EViews versi 10. Metode analisis dalam penelitian ini meliputi: 1) Analisis statistik deskriptif 2) Uji Stasioneritas 3) Model Regresi dengan Panel Data	Profitabilitas, Perencanaan Pajak , Tata Kelola Perusahaan yang Baik memiliki pengaruh yang sama terhadap Manajemen Laba , sedangkan secara parsial hanya Perencanaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba .
9	Negara dan Suputra, (2017)	Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba.	Metode: <i>purposive sampling</i> . Teknik analisis : Statistik deskriptif dan metode regresi.	Perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba.
10	Noviardhi dan Hadiprajitno (2013)	Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Manajemen Laba	Metode penentuan sampel : <i>purposive sampling</i> Teknik Analisis: Regresi linear.	Dewan direksi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap manajemen laba. Dewan komisaris, struktur kepemilikan, komite audit, dan Leverage berpengaruh positif tidak signifikan

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Desain/ Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
11	Roodposhti dan Chashmi, (2011)	<i>The Impact Of Corporate Governance Mechanisms On Earnings Management.</i>	Metode pengambilan sampel ; <i>Purposive Sampling</i> Teknik Analisis : Statistik deskriptif, Uji asumsi klasik.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan bahwa Konsentrasi kepemilikan, independensi dewan, dominasi CEO, pemegang saham Institusional (GCG) berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.3 Perumusan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Manajemen Laba

Pengaruh perencanaan pajak dalam praktik manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori keagenan. Pada teori keagenan, dalam hal ini pemerintah (fiskus) sebagai pihak *principal* dan manajemen sebagai pihak *agent* masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda. Perusahaan (*agent*) berupaya untuk membayar pajak seminim mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi laba perusahaan. Disisi lain, pemerintah (*principal*) menginginkan penerimaan dari sektor pajak semaksimal mungkin. Dengan demikian, terjadi konflik kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah, sehingga memotivasi *agent* meminimalkan beban pajak yang harus dibayar kepada pemerintah. Karena itu, dengan adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat beban pajak seminim mungkin, maka pihak manajemen meminimalkan pembayaran pajak dengan berbagai cara, sepanjang proses tersebut masih tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut Gede dan Saputra (2017), Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba, yang artinya semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar peluang perusahaan melakukan manajemen laba, begitu pula sebaliknya. Selain itu skripsi yang selaras menurut Santana (2016), Perencanaan pajak memiliki pengaruh positif, semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar peluang perusahaan melakukan praktek manajemen laba. Berdasarkan uraian masalah yang ada, dapat dimunculkan suatu hipotesis:

H1 : Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap Manajemen Laba

2.3.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap Manajemen Laba

Komite audit memiliki kewajiban dalam mengawasi laporan keuangan, audit eksternal dan sistem pengendalian internal. Selain itu, komite audit juga mengawasi ketentuan perusahaan yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan. Sejalan dengan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No: 117/MMBU/2002 yang menerangkan, komite audit memiliki tugas untuk membantu Komisaris/Dewan Pengawas dalam mengawasi laporan keuangan, efektifitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor, dan memastikan efektifitas sistem pengendalian internal. Dari tugas dan tanggung jawab tersebut, menunjukkan bahwa komite audit memiliki dampak pada laporan keuangan antara lain menurunnya ketidaktepatan pengukuran akuntansi, pengungkapan akuntansi dan menurunnya tindakan kecurangan manajemen. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya manajemen laba. Noviardhi dan Hadiprajitno (2013), Komite audit berhubungan positif dengan *total accrual* yang merupakan indikator manajemen laba, artinya semakin besar jumlah komite audit perusahaan cenderung melakukan manajemen laba. Berdasarkan uraian masalah yang ada, dapat dimunculkan suatu hipotesis:

H2 : Komite Audit berpengaruh terhadap Manajemen Laba

2.3.3 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba

Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan, memiliki peranan penting terhadap aktivitas pengawasan perusahaan serta berperan meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat manajemen laba melalui monitoring atas laporan keuangan perusahaan. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris independen ini sangat diperlukan karena akan berdampak dalam pengambilan keputusan perusahaan walaupun dewan komisaris tidak terlibat secara langsung pada praktik manajemen laba, akan tetapi dewan komisaris independen dapat mempengaruhi praktik manajemen laba.

Giovani (2017) menemukan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, dalam penelitiannya menerangkan bahwa, pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat

terhindar dari kecurangan dengan adanya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen. Berdasarkan uraian masalah yang ada, dapat dimunculkan suatu hipotesis:

H3 : Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Manajemen Laba

2.3.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba

Kepemilikan institusional mempunyai kemampuan untuk mengatur pihak manajemen lewat proses monitoring secara efektif sehingga dapat mencegah hal buruk yang dapat dilakukan dengan praktik manajemen laba. Investor institusional dapat memberikan pengawasan yang aktif. Investor institusional yang memiliki kepemilikan saham yang besar akan mempunyai dorongan yang kuat untuk mendapatkan informasi, melakukan pengawasan terkait perilaku manajemen hal ini sangat berguna bagi pengelolaan perusahaan yang baik. Selain itu, motivasi kepemilikan institusional akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda. Manajer akan berusaha untuk memenuhi target laba demi kepentingan pemilik. Menurut Giovani (2017), Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Berdasarkan uraian masalah yang ada, dapat dimunculkan suatu hipotesis:

H4 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Manajemen Laba

2.3.5 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba

Kepemilikan manajerial merupakan salah satu faktor yang terdapat dalam tata kelola perusahaan atau *Good Corporate Governance*. Muid (2009) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif kepemilikan manajerial terhadap kualitas laba ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin besar kepemilikan dalam perusahaan maka manajemen akan cenderung untuk berusaha meningkatkan kinerjanya. Karena, pihak manajemen tidak akan melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, karena nilai saham yang dimiliki perusahaan akan turun jika perusahaan mengalami kerugian. Hal ini mengakibatkan pihak manajemen melakukan hal terbaik demi memajukan perusahaan karena prestasi perusahaan terkait dengan nilai saham.

Kusumawardhani (2012) menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap Manajemen Laba. Selaras dengan skripsi sebelumnya Giovani (2017) menyimpulkan bahwa Kepemilikan Manajerial

berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. Berdasarkan uraian masalah yang ada, dapat dimunculkan suatu hipotesis:

H5 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Manajemen Laba.

2.3.6 Pengaruh Perencanaan Pajak, Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba

Penelitian yang dilakukan oleh Negara dan Saputra (2017), menyimpulkan bahwa, Perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba, yang artinya semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar peluang perusahaan melakukan manajemen laba, begitu pula sebaliknya. Menurut Juoro Lastomo dalam yang diterbitkan tahun 2016 menyebutkan, kesimpulan secara simultan dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, dan tax avoidance berpengaruh terhadap *earning management*. Secara parsial, dewan komisaris dan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *earning management*. Sebaliknya, variabel kepemilikan manajerial dan tax avoidance berpengaruh positif terhadap *earning management*. Namun, komite audit tidak berpengaruh terhadap *earning management*. Selain itu dalam penulisan lain Kusumawardhani (2012) menyimpulkan bahwa, *Corporate Governance*, struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional) dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba. Secara parsial, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap Manajemen Laba. Jika kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan tinggi, maka manajemen cenderung tidak melakukan Manajemen Laba. Maka dalam hal ini penulis merumuskan bahwa Perencanaan Pajak, Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba. Berdasarkan uraian masalah yang ada, dapat dimunculkan suatu hipotesis penulisan skripsi sebagai berikut:

H6 : Perencanaan Pajak, Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba.